

ABSTRACT

Mohamad Indra Setiawan, NPM 91811403161085 , Tinjauan Yuridis terhadap Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid 19 Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2020, Dibimbing oleh Dr. Abd. Muthalib Rimi SH, MH dan Darmi L Penyami, SH, MH

Kata Kunci : Asimilasi Rumah, Narapidana, Covid 19

Kebijakan untuk pembebasan narapidana sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran virus corona adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peristiwa tersebut dilandaskan pada kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas. Overcrowded atau kelebihan kapasitas penghuni dalam lapas telah menunjukkan suatu kekhawatiran bahwa hal tersebut bukan hal yang dapat dipermainkan..

Yang menjadi titik permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah Pengaturan Tentang Asimilasi Rumah bagi Narapidana Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 ? (2) Bagaimanakah Pelaksanaan Dan Syarat-Syarat pemberian Asimilasi Rumah bagi Narapidana dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan covid 19 ?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah Undang-undang serta regulasi yang erat kaitannya dengan masalah hukum yang dihadapi. Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual, yakni dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang yang relevan dengan masalah Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid 19 Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 32 Tahun 2020

Ketentuan Hukum Tentang Asimilasi Rumah bagi Narapidana Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 32 Tahun 2020 disebutkan bahwa Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju penularan Covid-19 yaitu dengan mengeluarkan kebijakan berupa pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Covid-19.



ABSTRACT

Mohamad Indra Setiawan. NPM: 91811403161085. *Juridical Review on Providing Home Assimilation for Prisoners in the Context of Prevention and Control of Covid 19 According to Minister of Law and Human Rights Regulation Number 32 in 2020.* Supervised by Abd. Muthalib Rimi and Darmi L. Penyami.

Keywords: Home Assimilation, Prisoners, Covid 19

The policy for the release of prisoners as an effort to suppress the spread of the corona virus is an authority given by the Indonesian government through the Ministry of Law and Human Rights. The incident is based on the government's concern about the spread of the corona virus in prisons. Overcrowded or overcapacity of residents in prisons has shown a concern that this is not something to be played with.

The problem formulations of this research are: (1) How is the regulation of home assimilation for prisoners according to the regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 in 2020? (2) How are the implementation and conditions for providing home assimilation for prisoners in the context of the prevention and control of Covid-19?

The approach method uses in this research is a statutory approach, namely the approach taken by examining laws and regulations that are closely related to the legal problems faced. In addition, the author also uses a conceptual approach method, namely by using the views and developing doctrines that are relevant to the issue of Providing Home Assimilation for Prisoners in the Context of Prevention and Control of Covid-19 according to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 in 2020

According to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 in 2020, it is stated that one of the efforts made by the government in suppressing the rate of transmission of Covid-19 is by issuing a policy in the form of providing assimilation and integration for prisoners and children through the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 in 2020. This policy is taken with careful consideration that almost all correctional institutions and detention centers in the country are overcapacity, making them vulnerable to the threat of the Covid-19 pandemic.